

BAB II

KERANGKA PIKIRAN

2.1. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian mengenai Peran Komisi Penanggulangan AIDS Di Kota Kupang (KPAD) dalam menangani penyebaran penyakit HIV/AIDS juga pernah dilakukan oleh (Reza Syahputra) Di Kota Samarinda. Dalam penelitiannya ia mengatakan bahwa KPAD Kota Samarinda telah melaksanakan kebijakan dan melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan HIV/AIDS baik secara program maupun lintas sektoral. Pencegahan HIV/AIDS oleh KPAD Di Kota Samarinda tidak dilakukan oleh semua bidang maupun seksi tetapi lebih banyak ditangani oleh Seksi Pengendalian Pemberantasan Penyakit (P2P) di Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan (PMK)

Dinas Kesehatan Kota Samarinda juga bekerja sama dengan beberapa Rumah Sakit baik dalam kegiatan dan sarana pelayanan pencegahan HIV/AIDS. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa Dinas Kesehatan Kota Samarinda hanya dapat melakukan langkah-langkah pencegahan HIV/AIDS melalui upaya pelayanan VCT mobile dan IMS.¹

Penelitian lainya Anjelo Freitas, dengan penelitian yang berjudul: penyebaran penyakit HIV/AIDS Di Kota Kupang. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang penyebaran penyakit HIV/AIDS Di Kota Kupang. Kegunaanya sebagai bahan masukkan dan informasi bagi lembaga

¹ Reza Syahputra, eJournal Ilmu Pemerintahan, Fisip-Unmul, hal 1862, 2015

pemerintahan khususnya bagi Dinas Kesehatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni deskriptif.²

Dari kedua penelitian di atas terdapat beberapa kesamaan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu pada tema penelitian yang menyangkut dengan penyebaran penyakit HIV/AIDS. Kesamaan lainnya juga terdapat pada metode penelitian yang dilakukan yakni deskriptif kualitatif./namun dalam penelitian ini adapun perbedaan yang terdapat dengan kedua penelitian di atas yang telah dilakukan sebelumnya yaitu pada tahun dilaksanakannya penelitian dan lokasi dilaksanakannya penelitian dan juga penelitian dari Reza Syahputra menjelaskan secara menyeluruh bagaimana peran dari KPAD Kota Samarinda beserta jajarannya bekerja sama dalam menanggulangi penyebaran HIV/AIDS Di Kota Samarinda sedangkan penelitian dari Anjelo Freitas hanya sebagai bahan masukan bagi pemerintah khususnya Dinas Kesehatan agar lebih memaksimalkan perannya untuk menanggulangi penyebaran HIV/AIDS Di Kota Kupang.

2.2. Kerangka Konseptual

2.2.1 Konsep Koordinasi

a. Pengertian Koordinasi

koordinasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau menyepakati sesuatu, sehingga di satu sisi proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang satu tidak mengganggu proses pelaksanaan tugas dan

² Anjelo Freitas, skripsi tentang penyebaran penyakit HIV/AIDS Di Kota Kupang ,FKM,2015

keberhasilan pihak yang lainnya. Sementara pada sisi lain yang satu atau tidak langsung mendukung pihak yang lain.³

Nawawi menjelaskan dalam buku Dewa Ketut Sukardi bahwa koordinasi adalah kegiatan mengatur dan membawa personil, metode, bahan, buah pikir, saran-saran, cita-cita, dan alat-alat dalam hubungan kerja sama yang harmonis, saling mengisi, dan saling menunjang, sehingga pekerjaan berlangsung efektif dan seluruhnya terarah pada pencapaian tujuan yang sama. Dalam hal ini KPAD sebagai koordinator beserta jajaran terkait harus mampu melakukan kerja sama yang baik dalam hal menanggulangi penyebaran penyakit HIV/AIDS di Kota Kupang. pendapat lain mengungkapkan bahwa koordinasi merupakan daya upaya untuk mensinkronkan dan menyatukan tindakan-tindakan sekelompok manusia. Koordinasi merupakan otak dalam tubuh manajemen.⁴

Dalam pengertian lain koordinasi adalah proses pengintegrasian aktivitas pada satuan-satuan terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuannya secara efisien. Atau proses menghubungkan aktivitas-aktivitas dari berbagai departemen dalam suatu organisasi.

Aktivitas kerja pada organisasi dibagi-bagi dan didepartemenkan, maka para pemimpin perlu mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas tersebut untuk mencapai tujuan organisasi. Pemimpin harus mengkoordinasikan tujuan ke

³ Taliziduhu Ndraha, *Kybernalogi Ilmu Pemerintahan Baru*, Jakarta, PT Rineka Cipta, Thn 2003

⁴ Dewa Ketut Sukardi, *Manajemen Bimbingan dan Konseling*, Bandung: Alfabeta, Thn 2002, Hal 130

subunit. Menerjemahkan tujuan kedalam tujuan subunit yang sesuai. Disamping itu juga menyampaikan informasi kepada subunit tentang aktivitas subunit lain sehingga bagian organisasi yang terpisah dapat bekerja sama dengan lancar.

Kemampuan pemimpin untuk mengkoordinasi secara efektif sebagian tergantung pada jumlah bawahan yang melapor pada mereka. Jumlah bawahan yang melapor ini disebut 'rentang kendali' makin banyak bawahan yang melapor pada pemimpin tertentu makin sukar pula pemimpin untuk mengawasi dan mengkoordinasikan aktivitas mereka, sebaliknya makin sedikit bawahan yang melapor, makin mudah pemimpin untuk mengadakan pengawasan dan mengkoordinasikan aktivitas mereka.

Kebutuhan Koordinasi

Kebutuhan akan koordinasi tergantung pada persyaratan bentuk komunikasi tugas-tugas yang dilakukan dan ketergantungan subunit yang melaksanakan tugas-tugas tersebut. Apabila tugas tersebut memerlukan atau dapat memperoleh manfaat dari arus informasi antar unit, maka yang terbaik ada koordinasi. Tetapi apabila persyaratan komunikasi tugas atau manfaat informasi antar unit tidak ada maka pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat melalui interaksi dengan anggota unit yang lain. Kebutuhan koordinasi juga dibutuhkan untuk pekerjaan non rutin dan tidak diperkirakan sebelumnya, misal pekerjaan yang berkaitan dengan faktor-faktor lingkungan yang berubah.

Teknik Dasar Koordinasi

1. Hirarki Manajemen

Garis komando organisasi menetapkan hubungan kerja dan pelaporan diantara para anggotanya. Hubungan kerja sub-subunit yang melapor pada tiap pemimpinnya juga dispesifikasikan, hal ini untuk memudahkan arus informasi dan kerja antara sub-subunit dan menunjukkan pertanggungjawaban.

2. Peraturan dan Prosedur

Peraturan dan prosedur merupakan suatu keputusan pimpinan yang diambil untuk menangani aktivitas-aktivitas rutin dan dapat menjadi alat koordinasi dan pengendalian rutin yang efisien, apabila peraturan dan prosedur organisasi dipahami dan digunakan oleh semua bawahan secara teratur maka kebutuhan berkomunikasi dengan atasan untuk masalah-masalah rutin dapat berkurang.

3. Perencanaan dan Penyusunan

Tujuan perencanaan dan penyusunan dalam cara mencapai koordinasi dengan cara menggerakkan seluruh unit kearah sasaran yang lebih luas dan sama. Tujuan perencanaan dan penyusunan merupakan hal yang sangat bermanfaat apabila pemimpin sekalipun telah berbekal pada peraturan dan prosedur tidak dapat mengolah semua informasi untuk mengkoordinasikan semua aktivitas sub-sub unit.

Manfaat Koordinasi

Dengan koordinasi dapat dihindarkan adanya kekosongan pengerjaan suatu aktivitas oleh satuan-satuan organisasi atau kekosongan pengerjaan oleh pejabat-pejabat, dengan koordinasi dapat disadarkan adanya kesadaran diantara pejabat untuk kerja saling membantu, dengan koordinasi dapat ditumbuhkan kesatuan kebijaksanaan antar pejabat, dan dengan koordinasi ada kesatuan sikap antar pejabat.⁵

b.Faktor-faktor yang mempengaruhi Koordinasi

Banyak faktor yang mempengaruhi koordinasi, Hasibuan (2006:88) berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi sebagai berikut:

a. Kesatuan Tindakan

Pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggotan atau satuan organisasi lainya agar tidak berjalan sendiri-sendiri.

b. Komunikasi

Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena komunikasi, sejumlah unit dalam organisasi dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi,

⁵ Maruli DMK, Jurnal, Pengertian dan Konsep Koordinasi, Thn 2014

misalnya komunikasi antara KPAD dan KPA (Komisi Peduli AIDS) dalam memberikan sosialisasi.

c. Pembagian Kerja

Dalam suatu organisasi, tiang dasarnya adalah prinsip pembagian kerja ini adalah maksudnya jika suatu organisasi diharapkan untuk dapat berhasil dengan baik dalam usaha mencapai tujuannya, maka hendaknya lakukan pembagian kerja.⁶

c.Fungsi Koordinasi

Fungsi koordinasi adalah fungsi yang menghubungkan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Koordinasi berarti mengikat, mempersatukan, dan menyelaraskan semua aktivitas dan usaha. Secara singkat, fungsi koordinasi terkandung dalam fungsi-fungsi lainnya. Contohnya, fungsi perencanaan membutuhkan koordinasi yaitu dalam menyusun rencana, seorang pemimpin harus melakukan koordinasi dengan bawahan untuk mengumpulkan data yang valid dalam merumuskan rencana kedepan. Begitu pula dengan fungsi lainnya.

d.Tujuan Koordinasi

Dari defenisi koordinasi dapat diketahui apa tujuan dari koordinasi. Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan koordinasi adalah untuk mewujudkan tujuan dari suatu organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Setiap tindakan koordinasi mempunyai tujuan, makin jelas tujuan yang diharapkan

⁶ Mochamad Akbar, Jurnal, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Koordinasi, 2013

atau yang dicapai, makin jelas pula bagaimana tindakan koordinasi itu dilakukan.⁷

e. Bentuk-bentuk Koordinasi

koordinasi dapat dibedakan dalam beberapa macam yakni:

1. koordinasi hierarkis (vertikal), yaitu koordinasi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pimpinan dalam suatu instansi terhadap pejabat atau instansi dibawahnya. Misalnya koordinasi yang dilakukan oleh seorang kepala direktorat terhadap para kepala sub direktorat yang berada dalam lingkungan direktoratnya.
2. Koordinasi fungsional, koordinasi yang dilakukan oleh pejabat atau suatu instansi terhadap pejabat atau instansi lainya yang tugasnya saling berkaitan berdasarkan asas-asas fungsional. Misalnya koordinasi yang dilakukan oleh KPAD terhadap mitra kerja serta instansi terkaitnya untuk melakukan rapat koordinasi untuk membahas mengenai penanganan penyebaran penyakit HIV/AIDS di Kota Kupang. Dalam rapat tersebut akan membahas mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk menangani penyebaran penyakit HIV/AIDS misalnya kegiatan sosialisasi dan penyuluhan secara berkala, dan juga KPAD akan melakukan bimbingan terhadap para penderita HIV agar mereka dapat mengembangkan minat dan bakat yang ada dalam diri mereka.

⁷ www.studimanajemen.blogspot.com, 2013/11, Diakses pada tanggal 19 Juli 2017

Koordinasi ini dapat dibedakan atas koordinasi fungsional horizontal, diagonal dan teritorial.⁸

- a. koordinasi fungsional horizontal, dilakukan oleh seorang atau instansi lain yang setingkat. Koordinasi fungsional horizontal dilakukan oleh pejabat atau instansi terhadap pejabat atau instansi lain yang lebih rendah tingkatnya tetapi bukan bawahannya. Misalnya informasi mengenai penyebaran virus HIV dari mitra kerja dan instansi terkait kepada KPAD sehingga dapat mengembangkan rencana pencegahan yang lebih efisien.
- b. Koordinasi fungsional teritorial, dilakukan oleh seorang pejabat atau instansi terhadap pejabat atau instansi lainnya yang berada didalam suatu wilayah tertentu dimana semua urusan yang ada didalam wilayah tersebut menjadi tanggung jawabnya. Misalnya koordinasi yang dilakukan oleh KPAD Kota Kupang terhadap KPAD Timor Tengah Utara (TTU) agar saling bertukar pikiran mengenai masalah HIV/AIDS sehingga dapat diselesaikan secara bersama-sama dan efektif.

f. Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Sebagai Koordinator

Sebagai koordinator, dimana KPAD beserta aparatnya, baik ditingkat pusat maupun kabupaten sampai di pedesaan harus mampu mendorong segenap lapisan masyarakat berperan secara aktif dalam program pencegahan penyakit HIV/AIDS. Bentuk dari Pemberian koordinasi ini biasanya adalah dengan melakukan koordinasi dengan mitra kerja dan juga dengan dinas

⁸ www.astiaprilia.blogspot.com, Diakses pada tanggal 19 Juli 2017

terkait untuk melakukan rapat koordinasi membahas mengenai masalah HIV/AIDS serta cara untuk menanggulangnya. Dalam rapat ini KPAD beserta dengan mitra kerja dan dinas-dinas terkait akan membahas mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dengan tujuan untuk dapat mencegah penyebaran penyakit HIV/AIDS di Kota Kupang. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud yaitu, sosialisasi yang dilakukan secara berkala terhadap para remaja, kemudian melakukan penyuluhan secara berkala, serta memberikan konseling dan tes kesehatan yang terjamin kerahasiaannya. Kemudian KPAD juga melakukan rehabilitasi sosial yaitu melaksanakan pendampingan mental, sosial, dan religi terhadap korban dengan mengembangkan minat dan bakat yang terdapat dalam diri seorang (ODHA).